

IMPLEMENTASI ISAK 35 TERHADAP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS NONLABA PADA GEREJA KRISTEN JAWI WETAN JEMAAT BANJAREJO

Sukowati¹ & Rahmad Harddian²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Universitas Kahuripan Kediri

email: sukowatiplosoklaten@gmail.com

Abstrak

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35 (ISAK 35) merupakan standart akuntansi yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non laba. Berdasarkan ISAK 35 laporan keuangan organisasi nonlaba meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan asset bersih, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. ISAK 35 menjadi standar pelaporan keuangan bagi entitas nonlaba sejak 1 Januari 2020. Gereja sebagai entitas nonlaba menjadi sasaran ISAK 35. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam penelitian ditemukan laporan keuangan gereja yang disusun secara sederhana nyata menimbulkan kesenjangan pemahaman antara bendahara jemaat dengan KP2J selaku komisi pengawasan dan perbendaharaan jemaat. Fenomena tersebut mendasari tujuan penelitian ini yakni implementasi ISAK 35 terhadap administrasi keuangan GKJW Jemaat Banjarejo. Sebagai hasil penelitian GKJW Jemaat Banjarejo dapat menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari : laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan asset netto, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Penerapan ISAK 35 ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas informasi keuangan gereja.

Kata Kunci: ISAK 35, Entitas Nonlaba, Laporan Keuangan Gereja.

Abstract

Interpretation of Financial Accounting Standards 35 (ISAK 35) is an accounting standard that regulates the presentation of financial statements of non-profit entities. Based on ISAK 35, the financial statements of non-profit organizations include a statement of financial position, a statement of comprehensive income, a statement of changes in net assets, a statement of cash flows, and notes to the financial statements. ISAK 35 has become the financial reporting standard for non-profit entities since January 1, 2020. The church as a non-profit entity is the target of ISAK 35. This study is a qualitative descriptive study using data collection techniques through interviews, documentation, and observation. In the study, it was found that the church's financial statements, which were prepared in a simple manner, clearly created a gap in understanding between the congregation's treasurer and KP2J as the congregation's supervisory and treasury commission. This phenomenon underlies the purpose of this study, namely the implementation of ISAK 35 on the financial administration of the GKJW Banjarejo Congregation. As a result of the study, the GKJW Banjarejo Congregation can present financial statements consisting of: a statement of financial position, a statement of comprehensive income, a statement of changes in net assets, a statement of cash flows, and notes to the financial statements. The implementation of ISAK 35 is expected to increase transparency, accountability, and the quality of church financial information

Keyword: ISAK 35, Non-Profit Entities, Church Financial Reports.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang dengan berbagai permasalahan di berbagai sektor kehidupan, khususnya sektor ekonomi, mendorong berupaya semaksimal mungkin mewujudkan pertumbuhan ekonomi hal ini terlihat dengan semakin banyaknya berdiri badan usaha-badan usaha di Indonesia. Namun kenyataannya pertumbuhan ekonomi di Indonesia sekarang ini belum mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi yang ada dalam masyarakat. Kondisi ini yang pada akhirnya mendasari masyarakat untuk hidup dalam berorganisasi.

Organisasi merupakan wadah dimana manusia hidup berkelompok atau beranggotakan orang-orang yang bekerjasama guna menggapai tujuan bersama (Dunggio, 2020). Pada umumnya terdapat dua jenis organisasi yang menunjang perekonomian di Indonesia, yaitu organisasi bisnis yang berorientasi pada laba (profit motive) dan organisasi non bisnis yang tidak berorientasi pada laba (nonlaba). Meskipun diantara organisasi yang berorientasi laba dan nonlaba terdapat perbedaan, tetapi juga memiliki kesamaan, yakni sama-sama dituntut memberikan informasi dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan sejumlah dana yang

diterimanya. Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas manajemen, organisasi nonlaba tetap harus menyajikan laporan keuangan meskipun tidak bermaksud memperoleh keuntungan dari kegiatan organisasinya (Warastuti *et al.*, 2022). Setiap organisasi harus memiliki pedoman atau standar terkait kegiatan pelaporan akuntansinya (Santini dan Wati, 2021).

Laporan keuangan adalah informasi yang diharapkan mampu memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial. Organisasi sektor publik sering kali dipandang sebagai organisasi yang tidak efisien dan jauh tertinggal dengan kemajuan dan perkembangan yang terjadi di sektor swasta. Hal ini bisa terjadi dikarenakan organisasi sektor publik merupakan milik masyarakat umum atau masyarakat di wilayah tertentu sehingga kemajuan dan perkembangan organisasi tergantung kesadaran dan perhatian masyarakat tersebut terhadap manajemen organisasi termasuk dalam praktik akuntansinya. Saat ini masih banyak organisasi keagamaan yang belum menerapkan standar penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yakni Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35 (ISAK 35).

Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) sebagai salah satu lembaga keagamaan yang berdiri dan berkembang di Jawa Timur, memiliki peran penting dalam membina kehidupan spiritual, sosial dan ekonomi jemaatnya. Dalam menjalankan berbagai program pelayanan, GKJW mengelola dana yang berasal dari beberapa sumber yakni hasil bumi (pekarangan), sewa sawah (aset gereja), persembahan warga jemaat dan bantuan dari donatur-donatur. Oleh karena itu pengelolaan menjadi aspek penting dalam membangun akuntabilitas dan transparansi keuangan untuk memastikan pelayanan gereja berjalan dengan baik. Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Banjarejo, yang menjadi fokus penelitian ini adalah salah satu GKJW yang terletak di kecamatan plosoklaten kabupaten Kediri, tepatnya beralamat di dusun banjarejo desa pranggang kecamatan plosoklaten kabupaten Kediri provinsi Jawa Timur. Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Banjarejo merupakan gereja induk dengan 3 wilayah lain yang menjadi bagian wilayah pelayanan yang dinamakan pepanthan. Adapun pepanthan dari Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Banjarejo antara lain Papanthan Trisulo, Papanthan Badek dan Papanthan Sepawon.

Bendahara Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Banjarejo dalam menyusun laporan keuangan saat ini masih tergolong sangat sederhana, karena belum mengikuti prinsip-prinsip dasar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan yang tersusun hanya berupa daftar penerimaan dan belanja (pengeluaran) mingguan dan jumlah rekapitulasi bulanan, terkadang tanpa bukti dukung (nota dan lain sebagainya) yang lengkap. Kondisi ini menyebabkan timbulnya keluhan dari KP2J selaku komisi yang bertugas sebagai

pengawas dan pemeriksa keuangan internal gereja. Dalam sidang majelis jemaat gereja KP2J menyampaikan kesulitannya memahami laporan keuangan gereja termasuk kesulitan dalam menelusuri arus dana. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman antara bendahara gereja selaku penyusun laporan keuangan dengan KP2J selaku pemeriksa. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain (1) bendahara tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, (2) GKJW Banjarejo belum pernah mengadakan pelatihan penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku dikarenakan keterbatasan anggaran.

Mengingat laporan yang dibuat bendahara gereja dijadikan alat ukur manajemen organisasi, khususnya bagi GKJW Jemaat Banjarjo juga merupakan salah satu bahan sidang majelis gereja serta menjadi acuan untuk pengambilan beberapa keputusan, dalam sidang majelis gereja KP2J menyampaikan sebagai organisasi keagamaan perlu untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan standar pengelolaan keuangan yang berlaku. Selain itu dengan penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku diharapkan meminimalisir kesalahan informasi antara bendahara dan pengguna informasi dalam hal ini KP2J GKJW jemaat Banjarejo. Penerapan ISAK 35 dalam pengelolaan keuangan gereja diharapkan mampu memberikan informasi yang jelas kepada semua pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Banjarejo, Desa Pranggang, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, pada Januari hingga Mei 2025. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menguraikan, menggambarkan, dan membandingkan data sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk mengumpulkan data, peneliti menerapkan teknik wawancara dan observasi langsung di lapangan. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer seperti hasil wawancara dan kuesioner, serta data sekunder berupa laporan keuangan gereja yang diterbitkan secara berkala.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari badan pengurus gereja, termasuk Pendeta Jemaat, Bendahara Induk, Sekretaris Keuangan Pewanth, dan Badan Pengawasan Perbendaharaan Jemaat (KP2J). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam sebagaimana

dijelaskan oleh Moleong (2016:186), serta dokumentasi berupa laporan keuangan dan dokumen administratif lainnya yang relevan dengan penelitian.

Untuk menguji validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak seperti bendahara, sekretaris, dan pendeta jemaat. Prosedur penelitian mengacu pada tahapan yang diusulkan oleh Moleong (2007:126), yaitu tahap pra-lapangan, pekerjaan lapangan, dan analisis data. Tahap pra-lapangan meliputi persiapan seperti penyusunan rancangan penelitian dan perizinan. Pada tahap pekerjaan lapangan, data dikumpulkan menggunakan lembar wawancara, alat rekam, dan dokumentasi. Setelah data dikumpulkan, tahap terakhir ialah analisis mendalam untuk kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan teori dan data yang telah diuji kredibilitasnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Konteks Kelembagaan GKJW dan Jemaat Banjarejo

Greja Kristen Jawi Wetan (GKJW) merupakan gereja teritorial di Jawa Timur yang dideklarasikan melalui pembentukan Majelis Agung (MA) pada 11 Desember 1931 dengan nama “Pasamuwan-pasamuwan Kristen ing Tanah Djawi Wetan”, dan memperoleh pengakuan resmi pemerintah kolonial sebagai *Oost-Javaansche Kerk*; penamaan “Greja Kristen Jawi Wetan” ditetapkan kembali melalui S.K. Ditjen Bimas (Kristen) Protestan pada 1979. Majelis Agung berpusat di Malang dan berfungsi sebagai wadah sinodial.

Sejarah dan Cakupan Pelayanan Jemaat

GKJW Jemaat Banjarejo berawal dari 11 keluarga perintis (1887) dan menjadi jemaat mandiri pada Minggu Wage, 25 Mei 1975. Restrukturisasi wilayah pada 2011 mendewasakan Pepanthan Kawarasan dan memindahkan Pepanthan Petungombo ke GKJW Jemaat Segaran–Wates; kini wilayah pelayanan mencakup Banjarejo (induk) serta Pepanthan Wonorejo Trisulo, Badek, dan Sepawon.

Lokasi Geografis dan Batas Wilayah

Secara geografis, jemaat terletak pada lintang -7.8453037601390685 dan bujur 112.17265707116435 , tepatnya RT 01 RW 01 Dusun Banjarejo, Desa Pranggang, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri. Wilayah pelayanan meliputi Desa Pranggang, Wonorejo Trisulo, dan Sepawon, dengan batas: utara Desa Sumberagung, timur Dusun Petungombo (Desa Sepawon), selatan Desa Plosolor, dan barat Desa Punjul.

Tata Kelola Internal

Struktur GKJW bukan hierarkis melainkan persekutuan lintas tingkat: Jemaat, Majelis Daerah, dan Majelis Agung. Di tingkat jemaat, Pendeta Jemaat melayani bersama Majelis Jemaat dan Badan Pembantu Majelis Jemaat (BPMJ). Pelayan Harian Majelis Jemaat (PHMJ) menangani koordinasi harian bulanan, sedangkan Sidang Majelis—diselenggarakan triwulanan—merupakan otoritas tertinggi dan penentu akhir keputusan, termasuk keuangan.

Proses dan Tujuan Pelaporan

Laporan keuangan berfungsi memberi informasi posisi, kinerja, dan arus kas sebagai dasar pengambilan keputusan serta pertanggungjawaban atas sumber daya. Di GKJW Jemaat Banjarejo, laporan disampaikan setiap tribulan dalam Sidang Majelis dan terlebih dulu diperiksa oleh Komisi Pengawasan Perbendaharaan Jemaat (KP2J).

Temuan Pengawasan KP2J

Dalam sidang keempat di Papanthan Sepawon, KP2J menyampaikan bahwa laporan keuangan jemaat belum menggunakan standar baku; *buku besar umum* (BKU) masih berupa catatan mingguan/bulanan dengan dua format (penerimaan dan belanja), menyulitkan pembacaan. KP2J merekomendasikan penerapan standar agar laporan mudah dipahami semua pihak; masukan ini berulang namun belum tertangani tuntas oleh PHMJ, khususnya Bendahara Jemaat.

Penerimaan dan Pengeluaran

Tahun 2024 mencatat total penerimaan Rp133.687.650,00 dan total pengeluaran Rp130.388.100,00. Pembukuan masih manual karena keterbatasan pengoperasian komputer, dan format mengikuti pedoman akun dari Majelis Agung GKJW.

Penyusunan Ulang Sesuai ISAK 35: Laporan Penghasilan Komprehensif

Dengan mengacu ISAK 35, disusun *Laporan Penghasilan Komprehensif* yang memisahkan aktivitas tanpa pembatasan dan dengan pembatasan dari pemberi sumber daya. Hasilnya menunjukkan surplus/(defisit) tanpa pembatasan Rp (12.484.400,00), surplus dengan pembatasan Rp15.783.950,00, tanpa penghasilan komprehensif lain, sehingga *total penghasilan komprehensif* tercatat Rp3.299.550,00.

Penyusunan Ulang: Laporan Perubahan Aset Neto

Laporan Perubahan Aset Neto memperlihatkan saldo akhir aset neto tanpa pembatasan Rp3.299.550,00 setelah pembebasan pembatasan (Catatan C) dari aset neto dengan pembatasan; aset neto dengan pembatasan berakhir nihil karena dibebaskan, sehingga *total aset neto* per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.299.550,00.

Penyusunan Ulang: Laporan Arus Kas & Posisi Keuangan

Laporan Arus Kas menunjukkan kas bersih dari aktivitas operasi Rp75.977.200,00, tidak ada arus investasi, dan arus pendanaan mencerminkan penerimaan sumbangan dibatasi dana abadi Rp28.110.950,00 serta berbagai pembayaran operasional/kontribusi, menghasilkan kenaikan bersih kas Rp3.299.550,00. *Laporan Posisi Keuangan* menampilkan *kas dan setara kas* Rp3.299.550,00 tanpa aset lancar/tidak lancar lain maupun liabilitas—sehingga struktur per 31 Desember 2024 sepenuhnya tercermin sebagai *aset neto* Rp3.299.550,00.

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan A menjabarkan sumbangan dengan pembatasan dari Dana Persekutuan tiga pepanthan Rp28.110.950,00. Catatan B merinci pendapatan lain dengan pembatasan dari pemanfaatan aset tanah (sewa/hasi l bumi) Rp35.300.000,00. Catatan C menguraikan biaya persekutuan ke MA, MD, dan BAMAG Rp47.627.000,00. Catatan D menjelaskan mekanisme *dibebaskan dari pembatasan* setelah tujuan pemberi sumber daya tercapai. Catatan E menegaskan tidak ada pembelian aset lancar lain dari sumbangan terbatas.

Pembahasan

Catatan Atas Laporan Keuangan

Keutuhan laporan keuangan sangat memerlukan catatan atas laporan keuangan, karena catatan atas laporan keuangan ini mendukung laporan keuangan sebelumnya, namun demikian GKJW Jemaat Banjarejo belum menyajikan catatan atas laporan keuangan pada tahun 2024. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Berikut catatan atas laporan keuangan GKJW Jemaat Banjarejo paa tahun anggaran 2024.

Catatan A :

Tabel 1. Sumbangan dengan pembatasan diperoleh dari dana persekutuan (DP) 3 pepanthan.

Keterangan	D	K
Kas		
Dana Persekutuan	Rp. 28.110.950,00	
Pepanthan		Rp. 28.110.950,00

Tabel 2. Sumbangan Dengan Pembatasan

No	Keterangan	Jumlah
1	Pepanthan Trisulo	Rp. 10.281.250,00
2	Pepanthan Badek	Rp. 6.058.100,00
3	Pepanthan Sepawon	Rp. 11.771.600,00
	Jumlah	Rp. 28.110.950,00

Catatan B

Penghasilan lain dengan pembatasan merupakan hasil usaha lain yang dilakukan GKJW Jemaat Banjarejo melalui pemanfaatan sumbangan asset tetap berupa tanah (sawah dan tegal) dalam bentuk sewa sawah dan hasil pengelolaan tegal.

Tabel 3. Penghasilan lain

Keterangan	D	K
Kas	Rp. 35.300.000,00	
Pendapatan		Rp. 35.300.000,00

Tabel 4. Penghasilan Lain Dengan Pembatasan

No	Keterangan	Jumlah
1	Uang Sewa Sawah Kidul Turi, Kulon Tembok, Kali Teng	Rp. 6.000.000,00
2	Uang Sewa Sawah Lesung Bendo (A)	Rp. 11.500.000,00
3	Uang Sewa Sawah Lesung Bendo (B)	Rp. 3.400.000,00
4	Uang Sewa Sawah Lesung Bendo (C)	Rp. 3.400.000,00
5	Uang Sewa Tegal Rigingong	Rp. 1.800.000,00
6	Uang Sewa Tegal Sumberagung	Rp. 4.000.000,00
7	Bagi Hasil Tegal Timur & Selatan Gereja	Rp. 770.000,00
8	Bagi Hasil Tegal Utara Gereja	Rp. 100.000,00
9	Bagi Hasil Tegal Selatan Pastori	Rp. 30.000,00
10	Hasil Bumi Lainnya	Rp. 4.300.000,00
	Jumlah	Rp. 35.300.000,00

Catatan C

Biaya kegiatan internal gereja yang dikeluarkan guna menunjang kegiatan majelis agung dan majelis daerah, dengan besaran nominal ditentukan berdasarkan akta sidang majelis agung GKJW maupun majelis daerah kediri utara 1 GKJW.

Tabel 5. Biaya Kegiatan Internal Gereja

No	Keterangan	Jumlah
1	Dana Persekutuan Majelis Agung GKJW	Rp. 38.520.000,00
2	Dana Persekutuan Majelis Daerah Kediri Utara 1	Rp. 8.987.000,00
3	Dana Persekutuan BAMAG Kecamatan Plosoklaten	Rp. 120.000,00
	Jumlah	Rp. 47.627.000,00

Catatan D

Asset neto yang dibebaskan dengan pembatasan merupakan asset dari pemberi sumber daya dengan pembatasan yang sudah memperoleh keuntungan. Karena pemberi sumber daya sudah mencapai tujuan, keuntungan tersebut dibebaskan dari batasan sumber daya

Catatan E

GKJW Jemaat Banjarejo tidak melakukan pembelian aset lancar lain dari sumbangan yang diberikan dengan pembatasan oleh pemberi sumber daya.

Kesenjangan Standar dan Dampaknya

Belum diterapkannya ISAK 35 pada pelaporan awal menimbulkan risiko salah tafsir atas kinerja dan posisi keuangan karena tidak ada pemisahan antara dana tanpa pembatasan dan dengan pembatasan, serta tidak tersedianya empat laporan utama (penghasilan komprehensif, perubahan aset neto, arus kas, dan posisi keuangan). Penyusunan ulang memperlihatkan gambaran yang lebih *faithful* mengenai defisit operasi inti dan penopangan melalui dana terbatas (ISAK 35).

Relevansi Catatan A–E terhadap Akuntabilitas

Catatan A dan B menegaskan sumber daya dengan pembatasan (DP pepanthan dan hasil pemanfaatan tanah), sedangkan Catatan C menunjukkan komitmen kewajiban persekutuan ke MA/MD/BAMAG. Catatan D memastikan transparansi saat pembatasan berakhir (*release from restriction*), dan Catatan E menghindari salah klaim aset. Keberadaan catatan-catatan ini krusial untuk *disclosures* dan kepatuhan pengelolaan dana terikat (4.2.5; Catatan A–E).

Tata Kelola dan Peran Pengawasan

Arsitektur otoritas menempatkan Sidang Majelis sebagai pengambil keputusan tertinggi, sementara KP2J bertindak sebagai pengawas teknis. Masukan KP2J mengenai format non-baku dan BKU yang minimalis menunjukkan kebutuhan peningkatan kapasitas bendahara/PHMJ, termasuk digitalisasi pembukuan agar temuan berulang tidak terakumulasi (temuan KP2J; Sidang Majelis triwulanan).

Struktur Pendapatan, Beban, dan Risiko Pelaporan

Penerimaan 2024 (Rp133,69 juta) dan pengeluaran (Rp130,39 juta) tampak seimbang pada agregat, tetapi rekonstruksi ISAK 35 mengungkap defisit pada aktivitas tanpa pembatasan yang tertutup oleh dana terbatas. Biaya persekutuan (Catatan C) merupakan pos material yang perlu diproyeksikan periodik agar arus kas operasional rutin (mis. gaji/komunikasi/utilitas) tetap terjaga dan tidak bergantung pada pelepasan pembatasan.

Manfaat Adopsi ISAK 35 dan Langkah Implementasi

Penerapan ISAK 35 meningkatkan keterbandingan, akuntabilitas, dan kualitas keputusan Sidang Majelis karena pemisahan dana serta arus kas lebih jelas (4.2.1–4.2.4). Langkah praktis: (1) standarisasi bagan akun mengikuti pedoman MA; (2) digitalisasi BKU dan jurnal; (3) penyusunan rutin empat laporan utama plus Catatan; (4) *review* KP2J berbasis daftar periksa ISAK 35; (5) pelatihan bendahara/PHMJ mengenai dana terbatas dan mekanisme *release*.

Secara substansi, jemaat memiliki tata kelola yang memadai (Sidang Majelis/KP2J) dan basis penerimaan stabil, namun kualitas pelaporan awal belum memenuhi ISAK 35. Rekonstruksi menunjukkan *total penghasilan komprehensif* Rp3.299.550,00 dan *aset neto* akhir yang sepenuhnya kas. Prioritas ke depan adalah penerapan penuh ISAK 35, penguatan fungsi pengawasan, dan konsistensi Catatan A–E agar transparansi dan akuntabilitas keuangan GKJW Jemaat Banjarejo berkelanjutan (ISAK 35; Catatan A–E; Tabel 4.1.1–4.1.2).

SIMPULAN

GKJW Jemaat Banjarejo sebagai entitas nonlaba memperoleh dana dari hasil bumi/pekarangan, sewa aset sawah gereja, persembahan jemaat, dan bantuan donatur. Temuan utama menunjukkan praktik akuntansi masih sederhana—hanya berupa daftar penerimaan dan belanja—serta kelengkapan bukti transaksi yang belum memadai. Kondisi ini menyulitkan KP2J dalam memeriksa laporan keuangan dan mendorong keluarnya himbauan dalam Sidang Majelis agar pelaporan mengikuti standar yang berlaku.

Sebagai organisasi nonlaba, gereja semestinya menyusun laporan sesuai ISAK 35—yang mencakup laporan posisi keuangan, penghasilan komprehensif, perubahan aset neto, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Keterlambatan penerapan di GKJW Jemaat Banjarejo utamanya disebabkan keterbatasan kapasitas bendahara (tanpa latar

belakang akuntansi) dan belum adanya pelatihan karena kendala anggaran. Meski demikian, penelitian ini berfokus membangun pemahaman standar akuntansi nonlaba dan menuntun penyusunan laporan yang andal untuk dasar pengambilan keputusan jemaat.

Hasil akhirnya positif: melalui proses wawancara dan pendampingan kepada pendeta, bendahara, dan KP2J, GKJW Jemaat Banjarejo berhasil menyusun laporan keuangan Tahun 2024 sesuai ISAK 35. Ke depan, kesinambungan penerapan standar perlu dijaga melalui peningkatan kapasitas (pelatihan berbasis kasus gerejawi), perbaikan/ digitalisasi pencatatan, serta evaluasi berkala—termasuk bila perlu dukungan pihak ketiga—agar kualitas informasi keuangan semakin valid, akuntabel, dan berguna bagi keputusan jemaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, S. A., & Wira Bharata, R. (n.d.) (2023). *Hati Gembira Indonesia (Happy Hearts Indonesia)* 1(4).
- Butar Butar, E. A., & Purba, S. (2022). Implementasi ISAK 35 Terkait Laporan Keuangan Organisasi Nonlaba Pada Gereja HKBP SIDIKALANG II. *Asian Journal of Applied Business and Management*, 1(1), 31–42. <https://doi.org/10.55927/ajabm.v1i1.1815>
- Diviana, S., Putra Ananto, R., Andriani, W., Putra, R., Yentifa, A., & Siswanto, A. (2020). Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Berdasarkan Isak 35 Pada Masjid Baitul Haadi. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 15(2), 113–132.
- Dunggio, S. (2020). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Camat Duingi Kota Gorontalo. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 7(1), 1–9. <https://doi.org/10.37606/publik.v7i1.114>
- Girsang, C. M., Purba, S., Akuntansi, P., & Ekonomi, F. (2024). *Penerapan Isak 35 Terhadap GKPS Saribudolok Tentang Laporan Keuangan Organisasi Non-Laba* (Vol. 1, Issue 1). <https://ejournal.smart-scienti.com/Smart-Dedication>
- Indah Sari, D. (n.d.-a). Penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan ISAK 35. *Accounting Information System, Taxes, and Auditing*, 1(1). <https://akuntansi.pnp.ac.id/aista>
- Melia, Y. (2022). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Pada Organisasi Nonlaba: Literatur Review. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 5(1), 103. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v5i1.14500>

- Mengutip, C., Wahyudi, :, Analisis,), Penghambat, F.-F., Interpretasi, P., Akuntansi, S., Nomor, K., Al, M., Hendrini, E., Tanan, P., Bali, A. S., Akuntansi, P., Publik, S., & Kupang, P. N. (2022). Hal 8-17 8-Ihsan. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan AkutansiVol, 10(2)*, 45–52.
- Prayitno, H., Keuangan, K., & Nonprofit, S. (n.d.). *Pengelolaan & Standar Pelaporan Keuangan Non Profit sesuai ISAK 35 bagi Organisasi Non Laba (Yayasan, Perkumpulan)*.
- Purba, S., Sihombing, V. C., & Andy, S. (2023). Penerapan ISAK 35 Tentang Laporan Keuangan Organisasi Non-Laba pada Gereja Methodist Indonesia Gideon Bunut. *Jurnal IAKP, 4(2)*.
- Sahala Purba, Tobing, D., Tambunan, H., Siagian, L., & Elmawati, R. (2022). Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Berdasarkan ISAK 35 Di Gereja HKBP Pangaribuan. *ABDIKAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains Dan Teknologi, 1(1)*, 01–09. <https://doi.org/10.55123/abdikan.v1i1.70>
- Santini, N. K. M., & Wati, N. W. A. E. (2021). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Budaya Organisasi dan Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dalam Pelaporan Pendapatan untuk Pajak Hotel. *Hita Akuntansi Dan Keuangan, 2(2)*, 223–241. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i2.1541>
- Siahaan, L., & Purba, S. (2024). Penerapan ISAK 35 tentang Laporan Keuangan Organisasi Non-Laba pada Gereja HKI Tigabolon. *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas, 3(2)*, 51–61. <https://doi.org/10.35912/jastaka.v3i2.2786>
- Warastuti, Y. *et al.* (2022) ‘Studi Kualitatif Persepsi Pengurus Gereja Terhadap Pelaporan Keuangan Berbasis Isak 35’, *Jurnal Ekonomi, Manajemen Akuntansi dan Perpajakan (Jemap)*, 5(1), pp. 88–108. Available at: <https://doi.org/10.24167/jemap.v5i1.4067>.